



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2022

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PROVINSI KALIMANTAH TENGAH

KATA PENGANTAR

Terselenggaranya Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan pra syarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk hal ini diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Guna memenuhi hal tersebut, maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 ini dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan.

Selain berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance dalam perspektif yang lebih luas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 juga berfungsi sebagai media

pertanggungjawaban kinerja kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta kepada masyarakat/publik.

Akhirnya dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dapat diselesaikan. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah ini kami ucapkan terima kasih, semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Palangka Raya, Januari 2023

**Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



**Drs. AKHMAD HUSAIN, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690806 198911 1 002**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
Bab I. Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Gambaran Umum Organisasi.....	5
E. Isu-Isu yang Dihadapi.....	11
F. Sistematika Penulisan	14
Bab II. Perencanaan Kinerja	
A. Perencanaan Kinerja	16
B. Visi.....	16
C. Misi.....	17
D. Perjanjian/Penetapan Kinerja.....	21
Bab III. Akuntabilitas Kinerja	
A. Capaian Kinerja Organisasi	25
B. Realisasi Anggaran.....	38
Bab IV. Penutup	
A. Kesimpulan.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, tertulis bahwa laporan kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu Instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis Instansi yang berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Dalam pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 ditegaskan bahwa Kepala PD selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Kinerja dan menyampaikannya kepada Gubernur / Bupati / Walikota dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan peraturan-peraturan diatas beserta pasal-pasal yang telah disebutkan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan.

Selain berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* dalam perspektif yang lebih luas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah juga kepada masyarakat atau publik.

B. Dasar Hukum Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dan dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi

- Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 - 2026
 16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
 17. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/520/DPA-SKPD/2021 tanggal 31 Desember 2021, tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022.
 18. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/396/DPPA-SKPD/2021 tanggal 02 November 2022, tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022.

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan kegiatan dan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasinya.
2. Sebagai bukti laporan program dan hasil kegiatan kepada masyarakat.
3. Sebagai dasar untuk penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program, dan kegiatan periode yang akan datang.

4. Untuk penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

D. Gambaran Umum Organisasi

1. Kedudukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada tahun 2013 Badan Kesatuan Bangsa mengalami perubahan melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada tahun 2016, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dan pada tahun 2018 diperbarui dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Tugas, fungsi dan Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah, maka tugas, fungsi dan struktur organisasinya adalah sebagai berikut :

a. Tugas

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.

b. Fungsi

- 1) Perumusan, penyiapan kebijakan teknis dan pengkajian di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 2) Perumusan kebijakan dan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia pada Badan;
- 3) Perumusan penyiapan kebijakan dan pengkajian masalah strategis;
- 4) Pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 5) Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 6) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- 7) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.

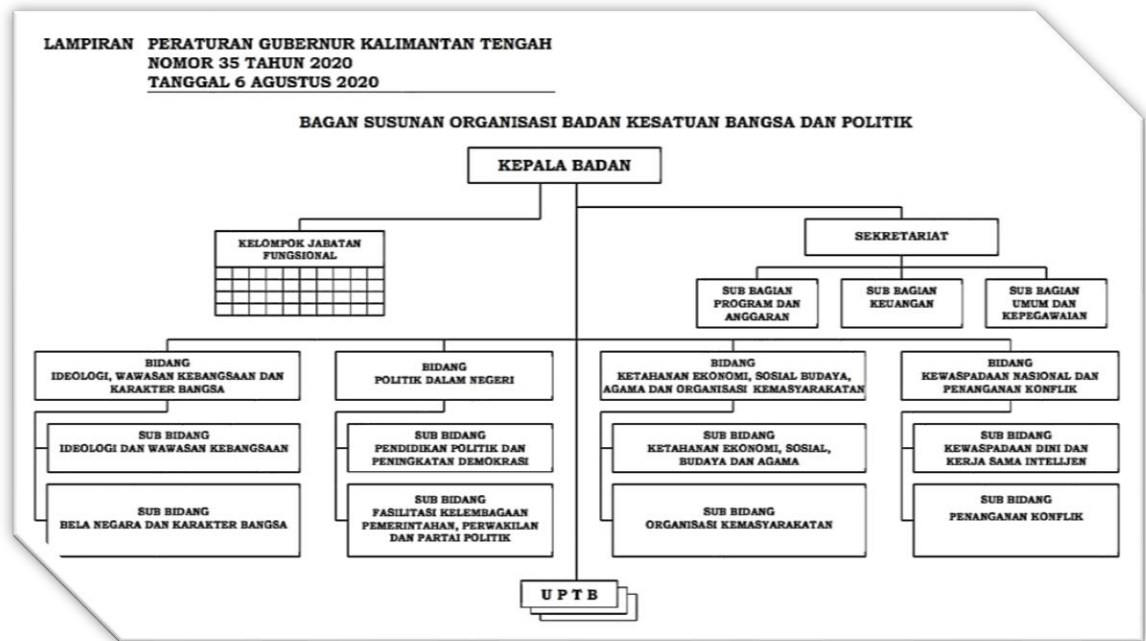
3. Struktur Organisasi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; kemudian Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Program dan Anggaran;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ketahanan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - 2) Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.
- d. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
 - 2) Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.
- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
 - 2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
- f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen;
 - 2) Sub Bidang Penanganan Konflik.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan Unit Pelaksana Teknis Badan.

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah



4. Sumber Daya PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber daya PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah guna menunjang tugas dan fungsinya saat ini dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah diklasifikasikan kedalam jenjang minimal SLTA atau Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan jenjang paling puncak yaitu jenjang Sarjana S2. Komposisi ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat di tabel berikut :

Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	S-2	4
2	S-1	19
3	D-4	1
4	D-3	1
5	SMA/Sederajat	4
6	SMP/Sederajat	0
Total		29

Dari jumlah 29 orang komposisi ASN berdasarkan kualifikasi pangkat dan golongannya dapat dilihat di tabel berikut :

Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat / Golongan

No	Pangkat / Golongan	Jumlah
1	II	2
4	III	23
8	IV	4
Total		29

Komposisi ASN berdasarkan jabatan struktural dan fungsional untuk menentukan seberapa besar tanggung jawab yang diemban sebagaimana tabel berikut :

**Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan
Struktural dan Fungsional**

No	Struktural dan Fungsional	Jumlah
1	Eselon II	0
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	1
4	Fungsional	23
Total		29

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang didalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. Sarana dan prasarana yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah berasal dari APBD. Sarana dan Prasarana yang dimiliki sebagai berikut :

Sumber Daya Berupa Sarana dan Prasarana

KIB	Nama Barang Inventaris	Jumlah s/d Tahun 2022
1	2	3
	ASET TETAP	
KIB A	Tanah	685.000.000
	Tanah	685.000.000
KIB B	Peralatan dan Mesin	3.231.849.923
	Alat-Alat Angkutan	1.073.168.208
	Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga	913.009.525

	Alat Studio dan Alat Komunikasi	162.045.890
	Alat Keamanan	21.300.000
	Komputer	1.062.326.300
KIB C	Gedung dan Bangunan	1.868.319.672
	Bangunan Gedung	1.868.319.672
KIB D	Jalan, Irigasi dan Instalasi	375.100.000
	Instalasi	375.100.000
KIB E	Aset Tetap Lainnya	626.769.200
	Buku dan Perpustakaan	61.839.200,00
	Tanaman Hortikultura	24.750.000
	Aset Tetap dalam Renovasi	540.180.000,00
	Jumlah I	6.787.038.795
	ASET LAINNYA	
1	Aset Tidak Berwujud	98.512.500
2	Aset yang akan dihibahkan	-
3	Aset Lain-Lain	362.163.392,00
	- Rusak Berat	362.163.392,00
	Jumlah II	460.675.892
	TOTAL = JUMLAH I+II+III	7.247.714.687

E. Isu-Isu Strategis Yang Dihadapi

Kalimantan Tengah dengan ibukotanya adalah Kota Palangka Raya terdiri dari 13 kabupaten dan 1 kota memiliki luas 157.983 km² dan berpenduduk sekitar 2.490.178 jiwa, yang terdiri atas 1.299.013 laki-laki dan 1.191.165 perempuan (hasil SUPAS 2015).

Dengan luasan wilayah tersebut Provinsi Kalimantan Tengah didiami berbagai macam suku bangsa dari seluruh wilayah di Indonesia. Suku asli dan dominan di Kalimantan Tengah yaitu Suku Dayak, sedangkan suku dominan lainnya yakni Suku Banjar dan Suku Jawa. Dari segi agama di Provinsi Kalimantan Tengah juga terdapat 5 agama nasional yakni Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan

Khonghucu serta terdapat kepercayaan lokal yakni Kaharingan yang merupakan kepercayaan penduduk asli Kalimantan Tengah.

Adanya keanekaragaman suku, budaya, agama dan partai politik serta berbagai jenis kelembagaan tersebut menjadikan wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai daerah yang cukup rawan terjadinya perselisihan antar suku dan agama serta gesekan-gesekan yang berpotensi terjadinya konflik.

Masalah ketentraman dan ketertiban umum dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kehidupan politik yang diarahkan untuk mewujudkan demokrasi masih dimaknai sebagai kebebasan semata oleh sebagian masyarakat yang seringkali dapat mengganggu kelompok masyarakat lainnya yang mempengaruhi kondisi ketentraman dan ketertiban umum. Dalam aspek hukum, penegakkan hukum yang lemah dan tidak konsisten mempengaruhi pula kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Permasalahan keamanan dan ketertiban umum yang ditemui adalah masih tingginya jumlah tindak pidana di Provinsi Kalimantan Tengah. Data menunjukkan pada tahun 2021 jumlah tindak pidana kriminalitas di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu sebesar 2.626 kasus (Sumber data : Polda Kalteng).

Upaya penurunan konflik dilakukan dengan melakukan pemilihan strategi, kebijakan, dan program yang tepat dengan meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan dan organisasi (mitra kerja) yang dibentuk untuk keperluan tersebut seperti Forum Koordinasi Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK),

Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT). Sekecil apapun isu yang berpotensi menimbulkan konflik yang berdasarkan hasil deteksi dini akan ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan atau aksi dalam pencegahan dini. Namun demikian jika konflik terjadi maka akan diusahakan agar cepat diselesaikan secara optimal agar tidak berdampak luas.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu:

a. Pendidikan politik masyarakat masih rendah

Dapat dilihat dari menurunnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilukada di Kalimantan Tengah serta potensi konflik-konflik yang muncul dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pemilukada.

b. Harmonisasi kehidupan bermasyarakat cenderung menurun

Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan semakin maraknya *conflict and communal violence* (konflik dan kekerasan komunal) di tengah masyarakat, seperti tawuran antar warga dan pertentangan antar komunitas/kelompok masyarakat.

c. Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat

Perkembangan dinamika kehidupan masyarakat serta arus globalisasi khususnya di bidang teknologi, informasi, budaya, dan ekonomi memunculkan ekses-ekses negatif dengan munculnya modus- modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus kerusakan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional dan transnasional.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 ini adalah berikut ini :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022, beserta gambaran umum organisasi dan juga sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2022 antara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dan Gubernur Kalimantan Tengah.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini menguraikan tentang capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan hasil pengukuran kinerja serta anggaran dan realisasi yang digunakan dalam mewujudkan outcome kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV Penutup

Berisi tentang kesimpulan umum atas capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran-lampiran

Dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Dalam pencapaian kinerja instansi pemerintah, perencanaan merupakan rencana strategis yang mana pada hakekatnya merupakan suatu program kerja yang akan dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. Rencana jangka menengah atau lebih dikenal sebagai Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategis Perangkat Daerah juga sebagai tolak ukur pengendalian dan evaluasi capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan strategi, kebijakan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Satuan Kerja Perangkat Daerah setiap tahun selama 5 (lima) tahun, dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi dan program Kepala Daerah.

B. Visi

Visi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dalam RPJMD tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut: **“Kalimantan Tengah Makin BERKAH : Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis”**.

C. Misi

Misi Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 sebagaimana terdapat dalam uraian bawah ini :

1. Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan
2. Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi
4. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing
5. Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender

Dalam hal ini, tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah yang terkait langsung dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, adalah sebagai berikut:

1. Misi ke 2 **“Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global”**.

Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang rawan bencana. Beberapa bencana yang sudah pernah terjadi, seperti bencana Tanah Longsor, Banjir, Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kebakaran Gedung dan Permukiman, Cuaca Ekstrem (Angin Puting Beliung dan Gelombang genangan air pasang ROB), Kegagalan Teknologi, Epidemik dan Wabah Penyakit maupun bencana sosial. Dalam rangka penguatan dan ketangguhan daerah perlu adanya antisipasi dampak bencana berupa investasi menghadapi bencana baik pada tataran siaga bencana, tanggap bencana dan rehabilitasi dan rekonstruksi. Investasi menghadapi bencana sangat diperlukan guna mitigasi

risiko dan meminimalisir dampak bencana. Bencana tidak mungkin kita hindari dan kerugian akibat bencana tidak bisa dikesampingkan. Namun demikian, semakin siap dalam menghadapi bencana maka risiko yang timbul bisa diminimalisir. Kesiapan menghadapi bencana juga menjadikan proses pemulihan pasca bencana semakin cepat. Pada akhirnya ketahanan pasca bencana akan menguat.

Penguatan ketahanan Daerah merupakan cara untuk menunjukkan bahwa daerah atau negara dalam upaya penguatan masyarakat (community building), pengembangan wawasan kebangsaan, dan pembangunan nasional harus menyasar pada aset dan modal sosial masyarakat. Aset dan modal sosial ini fokus pada penguatan nilai-nilai keagamaan, kebudayaan dan adat istiadat masyarakat lokal Kalimantan Tengah. Potensi tersebut akan maksimal bila strategi dan pendekatan yang digunakan adalah community building.

Community building yang dimaksud adalah sebuah pendekatan dalam mengatasi masalah dan menciptakan peluang pengembangan bagi komunitas lokal dalam mengantisipasi perubahan dan ancaman perubahan global. Implementasinya adalah dengan membangun komunitas mulai level keluarga; para keluarga saling belajar untuk saling bergantung dan bekerja bersama untuk hal-hal tertentu yang dapat menciptakan kesadaran diri yang baru terkait dengan aset mereka, baik kolektif maupun individual. Dalam prosesnya, kerja bersama antar keluarga akan menciptakan modal sosial, kekeluargaan dan kemanusiaan. Modal tersebut akan menyediakan landasan baru bagi masa depan yang lebih menjanjikan. Melalui kerja bersama tersebut, para keluarga yang terikat sebagai kesatuan komunitas kemudian bisa membangun

koneksi kembali (reconnection) dengan cita-cita (wawasan) kebangsaan untuk menghadapi persaingan dan ancaman globalisasi.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pokok misi 2, dirumuskan sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan, dan pusat-pusat kebudayaan beserta penguatan tokoh lintas agama sebagai penggerak peradaban dan pilar pembentuk kemajemukan;
- b. Melakukan pendampingan terhadap Komunitas Adat untuk memperoleh pengakuan sebagai Masyarakat Hukum Adat;
- c. Memperkuat masyarakat tahan bencana melalui mitigasi dan manajemen kebencanaan termasuk pemulihan ekonomi masyarakat terdampak covid-19;
- d. Mempercepat pengembangan Kawasan food estate dan penguatan ekonomi kerakyatan yang mengutamakan potensi dan keunggulan lokal.

2. Misi ke 5 **“Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender”**.

Pembinaan nilai-nilai religius atau keimanan sangat penting bagi masyarakat heterogen. Kalimantan Tengah yang heterogen tentu memiliki landasan filosofis yang kuat tentang kehidupan beragama. Nilai-nilai religius yang terkandung dalam setiap sikap dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara seharusnya menjadi perekat dalam menjalani kehidupan di tengah heterogenitas masyarakat Kalimantan Tengah yang memang dikenal memiliki keanekaragaman dalam hal suku, agama, ras serta golongan. Keanekaragaman ini patutlah menjadi kekayaan yang memberi warna bagi kehidupan masyarakat dan bukan menjadi sumber

perpecahan dan konflik. Kalimantan Tengah sudah belajar banyak mengenai konflik horizontal dengan berbagai isu yang berkembang, sehingga sudah saatnya untuk merancang suatu strategi dan model kehidupan masyarakat yang tenteram dan nyaman di tengah heterogenitas dan pluralisme bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila.

Oleh karena itu, pembinaan nilai luhur yang terkandung dalam agama dan budaya perlu dilakukan melalui berbagai upaya, seperti melalui proses pendidikan agama, latihan dan pembiasaan dan peneladanan. Dalam konteks sosio kultural, pendidikan merupakan proses untuk membudayakan nilai-nilai.

Selain meningkatkan peran religiusitas masyarakat dan nilai-nilai budaya local prosem pembangunan Kalimantan Tengah juga memperhatikan aspek-aspek kesetaraan gender. World Bank menyebutkan bahwa kesetaraan gender merupakan komponen pokok pembangunan yang akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan secara efektif. Dalam konteks itulah jika negara kita mau membangun pemerintahan yang maju setidaknya memperhatikan masalah secara khusus yang berkaitan dengan kesetaraan gender (World Bank, 2001). Oleh sebab itu, kebijakan yang berwawasan gender sangat diperlukan, maka setiap pelaksanaan program selalu menggunakan indicator atau pertimbangan keseimbangan peran dan manfaat bagi laki-laki maupun perempuan, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Dengan pendekatan ini pula setiap pelaksanaan program akan selalu menunjukkan bentuk kesetaraan, keadilan, demokratis dan transparansi yang dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pokok misi 5, dirumuskan sebagai berikut :

- a. Memperkuat partisipasi tokoh-tokoh lintas agama dan budaya sebagai simpul peradaban umat majemuk dan cinta damai yang berakar pada kearifan lokal falsafah Huma Betang (Rumah Besar);
- b. Mengembangkan pesantren dan institusi keagamaan lainnya sebagai garda terdepan dalam pembentukan insan Kalteng yang beriman, pancasilais dan cinta damai;
- c. Menciptakan pemuda yang berkompeten, berakhlakul karimah, berjiwa wirausaha dan berkebudayaan, serta berwawasan gender;
- d. Memperluas partisipasi perempuan sebagai pejabat publik yang berorientasi kesetaraan gender;

Mencegah bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan memperkuat perlindungan terhadap perempuan serta anak dari berbagai kekerasan.

D. Perjanjian/Penetapan Kinerja

Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai target kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Daerah dengan Kepala PD dalam hal ini adalah Gubernur dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. Penetapan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan :

1. Dokumen Perencanaan Jangka Menengah dalam hal ini adalah Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026.
2. Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan dalam hal ini adalah Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022.
3. Dokumen Penganggaran dan atau Pelaksanaan Anggaran dalam hal ini adalah APBD Tahun 2022.

Tujuan disusun dan ditetapkannya Perjanjian Kinerja Aparatur dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 adalah untuk :

1. Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi.
3. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Menilai keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi.

Penetapan Kinerja atau Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Politik	Skor IDI Aspek Hak-Hak Politik Provinsi Kalimantan Tengah	Nilai / Angka	78,25

2	Meningkatnya Jumlah Ormas/LSM Yang Terlibat Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik	Capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP aktif	Persen	75%
3.	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Kesatuan Bangsa	Masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan	orang	100
4.	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Pencegahan Konflik IPOLEKSOSBUD	Potensi terjadinya konflik terkait IPOLEKSOSBUD yang telah ditangani (Persentase kasus yang telah ditangani)	Persen	70%
5.	Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	orang	240
6.	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Yang Akuntabel	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100%

Jumlah anggaran yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan perjanjian kinerja tersebut sebagaimana Table berikut :

**Jumlah Anggaran Program Pendukung
Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	6.815.193.520	
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.169.914.900	
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	6.648.838.400	
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	247.506.250	
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.590.318.000	
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan	13.158.064.000	

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
	Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	74 - 100%	Baik
3	55 - 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Satuan	Target Realisasi Kinerja (%)		Kategori
					Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Jumlah	Skor IDI Aspek Hak-Hak Politik	78,25	Nilai / Angka	73,17	93,51%	Baik

	Masyarakat Yang Paham Terhadap Politik	Provinsi Kalimantan Tengah					
2	Meningkatnya Jumlah Ormas/LSM Yang Terlibat Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik	Capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP aktif	75	Persen	84,44%	112,59%	Sangat Baik
3	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Kesatuan Bangsa	Masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan	100	orang	300	300%	Sangat Baik
4	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Pencegahan Konflik IPOLEKSOSBUD	Potensi terjadinya konflik terkait IPOLEKSOSBUD yang telah ditangani (Persentase kasus yang telah ditangani)	70	Persen	65,63%	93,76%	Baik
5	Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	240	orang	178 orang	74,17%	Baik

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan Tahun Anggaran 2022 ini merupakan awal periode Rencana Strategis (2022-2026). Selain itu juga dikarenakan perbedaan target capaian kinerja yang akan dicapai dengan Rencana Strategis periode sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target RENSTRA (Kumulatif)	Realisasi 2022	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Politik	Skor IDI Aspek Hak-Hak Politik Provinsi Kalimantan Tengah	79,25	73,17	92,32%
2	Meningkatnya Jumlah Ormas/LSM Yang Terlibat Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik	Capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP aktif	95%	84,44%	88,88%
3	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Kesatuan Bangsa	Masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan	200 orang	300 orang	150%
4	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Pencegahan Konflik IPOLEKSOSBUD	Potensi terjadinya konflik terkait IPOLEKSOSBUD yang telah ditangani (Persentase kasus yang telah ditangani)	70 %	65,63%	93,33%
5	Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	200 orang	178 orang	89%

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja sasaran strategis, dilakukan pengukuran melalui media dokumen Penetapan Kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya yang disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Pada Tahun 2022 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah telah

melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana telah disusun didalam Rencana Kerja Tahun 2022.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan
1	2	3	4	5	6	
1	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Politik	Skor IDI Aspek Hak-Hak Politik Provinsi Kalimantan Tengah	78,25	73,17	93,51%	Hal-hal yang mempengaruhi tidak tercapainya target antara lain : - Aspek Kebebasan, pada poin Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat mendapat nilai 48,32. - Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi, pada poin Kinerja lembaga legislative mendapat nilai 40,00 sedangkan pada poin pendidikan politik pada kader partai politik mendapat nilai 38,18.
2	Meningkatnya Jumlah Ormas/LSM Yang Terlibat Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik	Capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP aktif	75%	84,44%	112,59%	-Kegiatan dengan tema "Peran Strategis Ormas serta Keterlibatan PKK dalam Mendukung Pembangunan Daerah dan Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa". Kegiatan tersebut diikuti peserta sebanyak 50 orang yang diundang yang berasal dari Ormas Adat, Ormas Perempuan dan Ormas/Yayasan yang bergerak di bidang kesejahteraan keluarga dan rakyat. -kegiatan Silaturahmi sekaligus Dialog antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ormas, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)/DEMA dan Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dengan tujuan mewujudkan kemitraaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan <i>Stakeholder/Mitra</i> Pemerintah yang berkualitas, Mandiri, Berkah, Berperan dalam mendukung pembangunan daerah serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa yang dihadiri undangan sebanyak 102 orang peserta.

3	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Kesatuan Bangsa	Masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan	100 orang	300 orang	300%	<p>-Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Tema "Internalisasi Nilai-nilai Pancasila Melalui Keluarga dan Lingkungan Hidup dalam Berbangsa dan Bernegara". Kegiatan ini diikuti oleh 100 orang peserta yang merupakan pelajar dan mahasiswa</p> <p>-Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara dengan Tema "Internalisasi Nilai-nilai Pancasila Melalui Keluarga dan Lingkungan Hidup dalam Berbangsa dan Bernegara" dengan jumlah peserta yang diundang sebanyak 100 orang</p> <p>-Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan bagi Tenaga Pendidik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dengan tema "Wawasan Kebangsaan Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal untuk Membentuk Pelajar Pancasila" dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang yang merupakan tenaga pendidik dari 20 sekolah yang ada di Palangka Raya</p>
4	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Pencegahan Konflik IPOLEKSOSBUD	Potensi terjadinya konflik terkait IPOLEKSOSBUD yang telah ditangani (Persentase kasus yang telah ditangani)	70%	65,63%	93,76%	Data yang telah dikumpulkan dari 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat 64 permasalahan yang memiliki potensi menjadi konflik dimasyarakat, 42 permasalahan telah dapat diselesaikan (65,63%) dan sisanya sebanyak 22 permasalahan (34,37%) sedang dalam proses tindak lanjut penyelesaian.
5	Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	240orang	178 orang	74,17%	<p>-Kegiatan Dialog Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Sejak Usia Dini dengan jumlah peserta sabanyak 80 orang yang merupakan pelajar dari SMA dan SMK baik negeri maupun swasta yang ada di Palangka Raya.</p> <p>-Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) bagi Komunitas ASN Anti Narkotika dengan jumlah peserta 50 orang yang merupakan perwakilan dari</p>

					<p>47 SKPD Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>-pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) bersama dengan beberapa pihak terkait. Penyusunan Raperda ini menjadi prioritas dikarenakan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di Provinsi Kalimantan Tengah masih relatif tinggi.</p> <p>-Pemilihan Duta Pelajar Anti Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 yang diharapkan dapat menjadi agen perubahan, panutan dan <i>Role Model</i> dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) untuk mewujudkan generasi muda sehat dan cerdas tanpa narkotika dan obat-obatan terlarang</p>

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran dan realisasi sumber daya keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Capaian
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Politik	78,25	73,17	93,51%	6.815.193.520	4.983.372.616	73,12	(26,88)
2	Meningkatnya Jumlah Ormas/LSM Yang Terlibat Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik	75	84,44%	112,59%	1.169.914.900	1.102.053.694	94,20	(5,80)
3	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Kesatuan Bangsa	100	300	300%	6.648.838.400	6.534.502.089	98,28	(1,72)
4	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Pencegahan Konflik IPOLEKSOSBUD	70	65,63%	93,76%	247.506.250	241.322.333	97,50	(2,50)
5	Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	240	178 orang	74,17%	1.590.318.000	1.453.282.864	91,38	(8,62)

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

a. Untuk capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Skor IDI Aspek Hak-Hak Politik Provinsi Kalimantan Tengah, data capaian yang ditampilkan merupakan data skor IDI Tahun 2021. Hal ini dikarenakan penilaian Skor IDI baru dilakukan setelah berakhirnya masa Tahun Anggaran yang bersangkutan. Capaian Skor IDI Tahun 2021 yang telah di *release* sebesar 73,17 dengan rincian :

i. Aspek Kebebasan	76,09
ii. Aspek Kesetaraan	75,07
iii. Aspek Kapasitas Lembaga	68,02

(sumber data : BPS Kalimantan Tengah)

Hal-hal yang mempengaruhi tidak tercapainya target antara lain :

- i. Aspek Kebebasan, pada poin Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat mendapat nilai 48,32.
- ii. Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi, pada poin Kinerja lembaga legislative mendapat nilai 40,00 sedangkan pada poin pendidikan politik pada kader partai politik mendapat nilai 38,18.

b. Indikator Kinerja Utama Capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP aktif (Persen). Indikator kinerja ini dicapai melalui program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Untuk pencapaian target ini telah dilaksanakan kegiatan dengan tema “Peran Strategis Ormas serta Keterlibatan PKK dalam Mendukung Pembangunan Daerah dan Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa”. Kegiatan tersebut diikuti peserta sebanyak 50 orang yang diundang yang berasal dari Ormas Adat, Ormas

Perempuan dan Ormas/Yayasan yang bergerak di bidang kesejahteraan keluarga dan rakyat.

Maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut adalah :

- i. Sebagai salah satu upaya konstruktif dalam membangun Kembali peran Ormas serta keterlibatan PKK sesuai perannya masing-masing dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan bangsa,
- ii. Sebagai upaya penguatan akan rasa dan sikap Nasionalisme yang tinggi disegala kehidupan serta berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- iii. Sinergitas dan Kerjasama yang baik antara Ormas, PKK dan Pemerintah dalam menyikapi permasalahan sosial kemasyarakatan, mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah juga melaksanakan kegiatan Silaturahmi sekaligus Dialog antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ormas, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)/DEMA dan Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dengan tujuan mewujudkan kemitraan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan *Stakeholder*/Mitra Pemerintah yang berkualitas, Mandiri, Berkah, Berperan dalam mendukung pembangunan daerah serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa yang dihadiri undangan sebanyak 102 orang peserta. Kegiatan tersebut juga upaya untuk mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan

Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 58 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum.

- c. Indikator Kinerja Utama (IKU) Masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan (orang). IKU tersebut diterjemahkan pelaksanaannya melalui program penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Untuk pencapaian sasaran strategis ini, pada Triwulan III Tahun Anggaran 2022 telah dilaksanakan 3 kegiatan, antara lain :

- i. Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Tema "*Internalisasi Nilai-nilai Pancasila Melalui Keluarga dan Lingkungan Hidup dalam Berbangsa dan Bernegara*". Kegiatan ini diikuti oleh 100 orang peserta yang merupakan pelajar dan mahasiswa. Maksud dan tujuan kegiatan ini ada adalah untuk menjadikan sumber daya manusia Indonesia khususnya generasi muda di Kalimantan Tengah agar berwawasan Pancasila, memiliki jiwa Nasionalisme dan Patriotisme; Memberikan arah kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan dan fasilitasi dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila; Menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada para generasi muda bahwa Pancasila adalah Ideologi yang mempersatukan NKRI.
- ii. Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara dengan Tema "*Internalisasi Nilai-nilai Pancasila Melalui*

Keluarga dan Lingkungan Hidup dalam Berbangsa dan Bernegara” dengan jumlah peserta yang diundang sebanyak 100 orang yang berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Maksud dan tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan ini adalah untuk Membangun sikap dan perilaku serta karakter setiap warga Negara Indonesia yang cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara. rela berkorban untuk bangsa dan negara serta nantinya memiliki kemampuan awal Bela Negara yang baik; meningkatkan pengetahuan, memiliki tekad, sikap dan perilaku serta tindakan bela negara yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila, nilai dasar bela negara, dan nilai dasar kewarganegaraan dalam rangka membentuk karakter bangsa yang ulet, tangguh, berwawasan kebangsaan dan memiliki kesadaran bela negara dalam rangka menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara; Bahwa dalam rangka menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, seluruh warga Negara mempunyai hak dan kewajiban pembelaan terhadap Negara, sehingga perlu upaya peningkatan kesadaran bela negara.

- iii. Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan bagi Tenaga Pendidik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dengan tema “Wawasan Kebangsaan Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal untuk Membentuk Pelajar Pancasila” dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang yang merupakan tenaga pendidik dari 20 sekolah yang ada di Palangka Raya. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk Membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk

pengembangan Pendidikan Wawasan Kebangsaan tingkat lokal, nasional dan regional sesuai peraturan sesuai perundang undangan; dan Memberikan nilai-nilai kearifan lokal bagi para guru tenaga pendidik dalam pembentukan identitas dan jati diri bangsa dilandasi Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

- d. Indikator kinerja utama Potensi Terjadinya Konflik Terkait IPOLEKSOSBUD yang telah ditangani (Persentasi Kasus yang telah Ditangani). Indikator kinerja ini dicapai melalui program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Data yang telah dikumpulkan dari 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat 64 permasalahan yang memiliki potensi menjadi konflik dimasyarakat, 42 permasalahan telah dapat diselesaikan (65,63%) dan sisanya sebanyak 22 permasalahan (34,37%) sedang dalam proses tindak lanjut penyelesaian.

Untuk menunjang pencapaian IKU tersebut telah dilaksanakan kegiatan “Bimbingan Teknis Deteksi Dini dan Cegah Dini Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 dalam rangka peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Penanganan Potensi Ancaman, Hambatan, Gangguan di Daerah menyongsong Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang bertempat di Hotel Luwansa Palangka Raya dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang.

Maksud dan Tujuan kegiatan ini dilaksanakan adalah untuk memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan kepada Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik se Kalimantan Tengah untuk bisa menganalisa masalah, mendeteksi secara dini terhadap perkembangan situasi daerah, meningkatkan peran serta Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik se Kalimantan Tengah ikut serta

mewujudkan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat khususnya di Wilayah Kalimantan Tengah dan dalam jangka pendek diharapkan sebagai mata telinga informasi kepada pimpinan dalam hal ini Kepala Daerah di wilayah Kalimantan Tengah serta sebagai bagian media pembelajaran dan turut serta mendukung keamanan untuk menyukseskan dan lancarnya Pemerintahan.

- e. IKU Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (orang). Indikator kinerja ini dicapai melalui program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :
 - i. Kegiatan Dialog Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Sejak Usia Dini dengan jumlah peserta sebanyak 80 orang yang merupakan pelajar dari SMA dan SMK baik negeri maupun swasta yang ada di Palangka Raya. Narasumber pada kegiatan ini adalah Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Maksud dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah untuk menanamkan pengertian kepada pelajar agar dapat memahami kerukunan dan toleransi dalam keberagaman agama, suku dan golongan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Sedangkan tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk memberikan pemahaman generasi muda terutama pelajar untuk dapat membangun harmonisasi dan toleransi di lingkungan sekolah dan masyarakat yang beragam/berbeda dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa.
 - ii. Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan

- Prekursor Narkotika (P4GN) bagi Komunitas ASN Anti Narkotika dengan jumlah peserta 50 orang yang merupakan perwakilan dari 47 SKPD Provinsi Kalimantan Tengah.
- iii. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah juga sedang melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) bersama dengan beberapa pihak terkait. Penyusunan Raperda ini menjadi prioritas dikarenakan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di Provinsi Kalimantan Tengah masih relatif tinggi.
 - iv. Kegiatan Pemilihan Duta Pelajar Anti Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 yang diharapkan dapat menjadi agen perubahan, panutan dan *Role Model* dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) untuk mewujudkan generasi muda sehat dan cerdas tanpa narkotika dan obat-obatan terlarang agar nantinya dapat mendukung pembangunan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2022, sesuai dengan DPPA Nomor 188.44/396/DPPA-SKPD/2022 Tanggal 02 November 2022, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah memiliki anggaran sebesar Rp29.629.835.070,-. Realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah untuk Tahun Anggaran 2022 per Program sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)	
			Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	6.815.193.520	4.983.372.616	73,12
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.169.914.900	1.102.053.694	94,20
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	6.648.838.400	6.534.502.089	98,28
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	247.506.250	241.322.333	97,50
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.590.318.000	1.453.282.864	91,38
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	13.158.064.000	9.227.967.650	70,13
Total		29.629.835.070	23.542.501.246	79,46%

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Secara keseluruhan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022 dalam kategori baik, namun harus diakui masih banyak kendala dan permasalahan yang dihadapi karena itu untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

Guna meningkatkan kinerja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah untuk Tahun Anggaran berikutnya akan melaksanakan beberapa hal, antara lain :

1. Pemetaan terhadap daerah rawan konflik di wilayah Kalimantan Tengah,
2. Pengawasan Ormas serta Penguatan Timdu Pengawasan Ormas,
3. Penguatan Peran dan Fungsi Forkopimda dalam menjaga kondusivitas wilayah Kalimantan Tengah,
4. Penguatan Partisipasi Politik dan peningkatan peran partai politik,
5. Penguatan Peran Toga, Tomas dan Ormas dalam menjaga kerukunan umat beragama,
6. Pelaksanaan Perda P4GN melalui Efektifitas Timdu P4GN, Sosialisasi dan Penyuluhan Perda P4GN,
7. Menguatkan komitmen dari semua Bidang untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 disusun, dengan harapan dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana berakuntabilitas sesuai amanat yang telah diemban dan menjadi sarana umpan balik bagi peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Provinsi Kalimantan Tengah di masa yang akan datang dan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Palangka Raya, Januari 2023

**Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



**Drs. AKHMAD HUSAIN, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690806 198911 1 002**